

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA DESA RENGGEANG KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Alwi Muqtafariq

Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email: alwimuqtafariq@gmail.com

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa pada Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Renggeang dikatakan sudah sangat baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dengan persentase skor aktual pengelolaan keuangan desa sebesar 93,8 persen.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa.

SUMMARY

This study aims to determine the financial management of the village in Renggeang Village, Limboro District, Polewali Mandar Regency. The data collection technique used in this research is using questionnaires and documentation. The sample in this study amounted to 13 village officials involved in managing village funds. This research uses qualitative descriptive analysis method. The results of the research carried out show that the village financial management is said to be very good in accordance with the Domestic Government Regulation Number 113 of 2014 with the percentage of the actual score of village financial management of 93.8 percent.

Keywords: Village Financial Management.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di Asia Tenggara. Indonesia juga disebut sebagai negara yang dibangun dari desa. Istilah desa sering kali diidentikkan dengan masyarakatnya yang miskin, tradisional, dan kolot. Namun sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengatur dan mengurus pemerintahan tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah. Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan negara.

Pada hasil penelitian mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa di beberapa daerah menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Tikollah dan Ngampo (2018) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. Yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. menunjukkan bahwa pada lima desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. namun kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya pemahaman Bendahara Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa disebabkan latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki sehingga harus didampingi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

Penelitian lain oleh Apriliani (2014) yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa dari tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa telah memenuhi prosedur yang berlaku. Namun masalah yang muncul adalah kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat.

Berdasarkan latar belakang dan hasil-hasil penelitian tersebut. Sehingga, penulis tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar”**

B. Kajian Teori

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): “Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.”

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1: Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014: “pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Kamaroesid (2017:281) asas pengelolaan keuangan desa terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa dan dokumen-dokumen yang mendukung dalam proses pengelolaan keuangan desa dari tahun 2018 sampai 2019 di desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Teknik Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Renggeang dikatakan sudah sangat baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 dengan persentase skor aktual pengelolaan keuangan desa sebesar 93,8 persen.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengelolaan keuangan Desa, maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, pengelolaan keuangan desa di Desa Renggeang dalam kategori sangat baik dengan rata-rata skor aktual dari semua tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu 90,6 persen. Meskipun demikian masih terdapat dua komponen yang berada di bawah skor aktual rata-rata walaupun masih dalam kategori sangat baik, yaitu (a) indikator perencanaan sebesar 89,2% dan (b) indikator pelaksanaan sebesar 88,7%.
2. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, pengelolaan keuangan desa di Desa

Renggeang tahapan yang memperoleh skor aktual paling tinggi yaitu tahapan penatausahaan dan pertanggung jawaban dengan masing-masing skor sebesar 92,3 persen.

3. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, penggunaan pengelolaan keuangan desa di Desa Renggeang tahapan yang memperoleh skor aktual paling rendah yaitu tahapan pelaksanaan dengan skor sebesar 88,7 persen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka terdapat beberapa saran yang perlu dipertimbangkan bagi sejumlah pihak untuk perbaikan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perangkat Desa: diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mengelola keuangan desa dengan memperhatikan setiap tahapan yang dilakukan dalam mengelolah keuangan desa terutama pada tahapan yang masih di bawah skor rata-rata aktual yaitu:
 - a. Indikator tahapan perencanaan pada item pernyataan bupati menetapkan hasil evaluasi raperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya raperdes tentang APBDes sebesar 76,9%
 - b. Indikator tahapan pelaksanaan pada item pernyataan penggunaan biaya tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa sebesar 69,2%
 - c. Indikator tahapan penatausahaan pada item pernyataan laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebesar 76,9%
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat mengembangkan lokasi penelitian di beberapa desa dan menambah variabel penelitian seperti transparansi pengelolaan keuangan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainul M. 2015. *Tinjauan atas pelaksanaan Keuangan Desa dalam mendukung kebijakan dana desa*. Jurnal diakses pada hari Senin, 17 September 2018 pada pukul 11.28 Wita
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Indirianasari, Neny tri. 2017. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karangsari)* Jurnal. diakses pada tanggal 15 Maret 2018 pukul 17.00 Wita.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kurnia, Dadang 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset Martono,
- Narimawati, U. 2008. *Teknik-teknik Analisis Multivariate untuk Riset Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurcholis, Harif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah desa*. Erlangga: Jakarta.
- Pusdiklatwas. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. BPKP. Bogor.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas konsep dan implementasi*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Subroto Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Wilayah Kecamatan Tlogmulyo kabupaten temanggung tahun 2008)*. Tesis diakses pada hari Rabu, 28 Februari pukul 20.00 Wita.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang ketentuan pengelokasian dan Penyaluran Dana Desa.
- Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.